



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Analisis Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Studi Kasus :
Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi.**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Cindy Tania

2014310040

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Analisis Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Studi Kasus :
Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi.**

Skripsi

Oleh

Cindy Tania

2014310040

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Cindy Tania
Nomor Pokok : 2014310040
Judul : Analisis Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Studi Kasus : Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 03 Agustus 2018
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Sekretaris merangkap pembimbing

Dr. Indraswari

: 

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cindy Tania

NPM : 2014310040

Jurusan/Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

(Studi Kasus : Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 09 Agustus 2018



Cindy Tania

ABSTRAK

Nama : Cindy Tania

NPM : 2014310040

Judul : Analisis Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. (Studi Kasus : Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan *stakeholder* dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dikawasan industri Cibaligo Kota Cimahi melalui variabel insentif dan sanksi, pemantauan, sumberdaya, otonomi, informasi, perilaku dan nilai. Dinas Lingkungan Hidup selaku pengawas dari pengelolaan air limbah yang dibuang oleh pelaku usaha yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah ini mengatur terkait tata cara pembuangan air yang harus di proses dalam IPAL agar memenuhi baku mutu yang ditentukan dan juga tata cara pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Teori implementasi kepatuhan yang dikemukakan oleh R.Kent Weaver digunakan sebagai alat analisa implementasi di dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan *stakeholder* dari Kota Cimahi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) permasalahan *reward* dan sanksi; 2) rendahnya penegakan hukum yang tegas; 3) kurangnya sumberdaya manusia, finansial, sarana dan prasarana yang disediakan pihak Dinas Lingkungan Hidup; 4) kurangnya otonomi *stakeholder* untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum; 5) kurangnya informasi yang tersampaikan kepada teknisi pengelolaan air limbah; 6) kurang tegas dalam nilai dan perilaku saat melakukan pengawasan

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Kepatuhan *stakeholder*, Tingkat kepatuhan.

ABSTRACT

Name : Cindy Tania

NPM : 2014310040

Title : Analysis of Stakeholders Compliance in Water Quality Management and Water Pollution Control Based On Government Regulation Number 82 Year 2001 about Water Management and Water Pollution Control .

(Case Study : In Cibaligo Industrial Area Cimahi City)

This research aims to analyze stakeholders compliance in Water Quality Management and Water Pollution Control in Cibaligo Industrial Area precisely at Cimahi City through these variables: incentive and sanction, monitoring, resources, autonomy, information, last but not least behavior and value. Environmental Department acts as inspector that handle wastewater management that disposed by business actors, it is based on Government Regulation Number 82 Year 2001 about Water Management and Water Pollution Control. That Government Regulation regulates related procedures for disposal of water that should be processed in IPAL in order to meet the specified quality standards and also the supervisory procedures in carrying out their duties.

The Compliance Implementation Theory proposed by R. Kent Weaver is used as an analysis tool in this writing. This research type is qualitative research.

The results of this research indicate that there are stakeholders who have low level of compliance in Cimahi City against Government Regulation 2001 Number 82 about Water Management and Water Pollution Control. That is caused by several things, those are: 1) reward and sanction problems; 2) the low firmness of law enforcement; 3) lack of human resources, financial, facilities and infrastructures provided by Environmental Department; 4) lack of autonomy from stakeholders to comply with legal regulations; 5) lack of information to the wastewater management technician; 6) less assertive in values and behavior when conducting surveillance.

Keywords: policy implementation, Stakeholder compliance, level of compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga seminar yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus : Dikawasan Industri Cibaligo kota Cimahi) “ .

Karya tulis ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kesalahan yang penulis buat. Hal tersebut, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis berharap agar setiap kritik dan saran yang membangun dapat menjadikan skripsi ini semakin lebih baik.

Pada Kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang teramat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis serta telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Agus Pribadi dan Ibu Iliana, serta kakak saya, Nico Prihadi dan Robby Valeri, terima kasih saya ucapkan dan sampaikan untuk setiap doa, dukungan, dan semua hal yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.

Kepada Ibu Dr. Indraswari, selaku dosen pembimbing, penulis sampaikan apresiasi, rasa hormat, dan ucapan terima kasih atas semua arahan, bimbingan

nasihat, masukan, dan juga waktu yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu memberikan kritik dan saran selama proses pembuatan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Deny Marcellinus Tri Aryadi, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Susana Ani Berliyanti, Ibu Maria Rosarie Harni, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Kristian Widya Wicaksono, terima kasih atas semua ilmu, didikan, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Andoko, segenap dosen Ilmu Administrasi Publik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen MKU, pegawai Tata Usaha, dan seluruh pihak yang terlibat dengan penulis selama proses perkuliahan.
6. Ibu Vicky, Bapak Lucky, Bapak Hidayat, dan Ibu Verina, selaku Pegawai Dinas Lingkungan Hidup kota Cimahi.
7. Perusahaan dan masyarakat yang sudah bersedia di wawancarai.

8. Sahabat-sahabat terkasih dan tersayang, Dwiki Anto, Dilla.A, Winny, Wisnu.B, Fely, Mandy, Shelma, Nauman, Iqbal, dan Putra terima kasih banyak telah menjadi sahabat berbagi dalam berbagai hal, sahabat seperjuangan selama kuliah, dan tentu menjadi sahabat “*Sharing*” selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi, Qnoy, Agatha, Annisa, Thalia, Genta, Vina, Evita, Rima dan Sendy, yang telah berbagi pengalaman dan pencerahan selama proses pembuatan skripsi berlangsung.
10. Teman-teman FISIP dan Administrasi Publik angkatan 2014.
11. Terimakasih kepada Muhammad Dzunnun Dahri yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi hingga selesai.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama perkuliahan maupun dalam seluruh proses pengerjaan skripsi ini, dimana pun kalian berada terima kasih banyak untuk segalanya.

Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 08 Agustus 2018

Cindy Tania

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Kebijakan Publik	9
2.2 Definisi Implementasi Kebijakan	11
2.3 Pendekatan Top Down	13
2.4 Definisi Kepatuhan	14
2.5 Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan	15
2.5.1 Insentif dan Sanksi	15
2.5.2 Pemantauan	16
2.5.3 Sumber Daya	16
2.5.4 Masalah otonomi	17
2.5.5 Masalah Informasi	17
2.5.6 Perilaku dan Nilai	18
GAMBAR 2.1 MODEL PENELITIAN	20
2.6 Operasional Variabel	21
BAB III MODEL PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Peran Peneliti	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Pengecekan Keabsahan Temuan	33
3.5 Teknis Analisis Data	34

BAB IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP CIMAH I DAN KAWASAN CIBALIGO	37
4.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	37
4.1.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup	37
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup	37
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	39
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	39
4.2 Kawasan Kota Cimahi	40
4.3 Kelurahan Cibeureum – Kecamatan Cimahi Selatan	42
4.4 Peta Kota Cimahi dan Kelurahan Cibeureum	44
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	45
5.1.1 Mematuhi Prosedur, jadwal, dan pembatasan	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Kepatuhan dari Perilaku Pelaksanaan Stakeholder	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Insentif dan Sanksi	45
5.2.2 Pemantauan	52
5.2.3 Sumberdaya	61
5.2.4 Otonomi	65
5.2.5 Informasi	68
5.2.6 Perilaku dan Nilai	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.6	Oprasional Variabel	22
Tabel 4.1	Aktivitas Keluarga dalam Meyediakan Air Bersih	44
Tabel 4.2	Lokasi Sumur Pantau Aktif	45
Tabel 4.3	Luas Wilayah	46
Tabel 5.1	Sanksi Administrasi	52
Tabel 5.2	Hasil Pengujian Kualitas Air	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	21
Gambar 4.1 Peta Kota Cimahi	47
Gambar 5.1 PROPER.....	52
Gambar 5.2 Kondisi Selokan Disekitar Cibaligo	59
Gambar 5.3 Upaya Perbaiki IPAL.....	64
Gambar 5.4 Alat Mengukur Suara dan Udara.....	66
Gambar 5.5 Kertas Pengukur Ph.....	67
Gambar 5.6 Saat Melakukan Pengawasan	80
Gambar 5.8 Kondisi Sumur Warga di Cibaligo	83
Gambar 5.9 Kondisi Sungai di Cibaligo	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara.....	95
Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	93
Lampiran 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003	112
Lampiran 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.....	115
Lampiran 5 Kartu Bimbingan	202
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data.....	203

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bahwa *stakeholder* yang terlibat sebagai salah satu pelaku usaha yang menghasilkan pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun bagi ekosistem sungai. Air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri. Maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalisir limbah buangan industri atau *dumping* (buangan) dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Keberadaan *stakeholder* yang kebanyakan membuang air limbah secara langsung tanpa melihat prosedur yang sudah ditetapkan sejak lama. Menimbulkan banyak permasalahan dari kekurangan air bersih, sungai berwarna hitam, bau, hingga berujung merusak lingkungan hidup. Melihat keadaan seperti itu, pemerintah Kota Cimahi berusaha untuk melakukan pengawasan, melainkan telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan para *stakeholder*, misalnya dengan pengarahan dan sosialisasi bagi *stakeholder*, diberlakukannya dengan mengelola air limbah secara berkala oleh Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (disingkat DHL). Namun, bukannya *stakeholder* semakin tertib justru sebaliknya, jumlah yang tidak mengelola air limbah semakin meningkat dilihat dari terjadinya

pencemaran air limbah di Sungai Cibaligo mencapai 68,17%. "Masih banyak pabrik yang belum mengelola air limbah . Sehingga, pencemaran masih tinggi¹.

Untuk mendukung ketaatan para *stakeholder*, salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan stakeholder adalah melalui aturan hukum. Terbukti dari pemerintah mengeluarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Tujuan utama dikeluarkannya peraturan ini adalah demi tercapainya meminimalisir limbah buangan industri dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa untuk upaya pencegahan. Pada PP pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota²dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan pada PP pasal 13 ayat 3³menyatakan bahwa pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal 16 huruf c menyatakan bahwa melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada penerbit izin membuang air limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya.⁴ Pada aturan ini bertujuan untuk mengontrol atau memantau

¹ <http://www.cimahikota.go.id/news/detail/1984> di akses tanggal 14 november 2017 pukul 23.53 WIB

² Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pasal 13 ayat 1

³ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pasal 13 ayat 2

⁴ peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal 16 huruf c

stakeholder agar membuang air limbah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Fakta yang terjadi *stakeholder* tidak bisa mengawasi secara rutin 3-6 bulan sekali, bahkan melakukan pengawasan setiap satu tahun sekali atau 8 bulan sekali. Hal tersebut adanya indikasi penyimpangan atau ketidakpatuhan *stakeholder*.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, disebutkan bahwa:⁵ pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa *stakeholder* harus menjamin kualitas air yang sesuai dan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemar namun dengan nyatanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapa Lucky selaku ketua pengawasan pengelolaan air limbah berikut keterangannya:

*“pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan tidak setiap 3-6 bulan sekali karena tergantung dari anggaran yang diberikan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang melanggar peraturan, biasanya kami pihak dinas hanya memberikan sanksi berupa teguran dan saya secara pribadi tidak mungkin melakukan pengawasan langsung jika tidak ada surat dari atasan untuk melakukan pengawasan ke pabrik, oleh karena itu otonomi untuk mengambil keputusan tidak bisa dari pihak saya, melainkan dari atasan saya yang memberikan anggaran”*⁶

⁵ Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

⁶ Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sebagai Pembinaan dan Pengawasan dari narasumber Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal (12.03.2018) pada pukul 08.45WIB.

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa stakeholder tidak rutin dalam menjalankan tugas pemantauan. Terdapat fakta yang mengejutkan bahwa pengawasan pengelolaan air limbah, dialih fungsikan kepada TNI AD terkait program Citarum Harum. Kolonel Yosep Sudrajat dan tim di lapangan menemukan PT. Aswindo membuang limbah ke sungai Cibaligo yang berada di Jalan Cibaligo, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Ciamhi. Menemukan aktivitas pembuangan limbah itu sekitar pukul 13.40 WIB. Air limbah berwarna merah darah dibuang ke aliran sungai Cibaligo.⁷

Hal ini merupakan kejadian yang seharusnya *stakeholder* memberikan sanksi yang sesuai dengan PP No 82 Tahun 2001 pada pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan : (1) setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. (2) selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. Fakta yang terjadi sanksi yang diberikan *stakeholder* hanya berupa sanksi administratif, hal ini tersebut ketidakpatuhan *stakeholder* dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. Hal tersebut dibuktikan melalui teori kepatuhan yang memiliki 6 dimensi kepatuhan salah satunya pemantauan dan sanksi.

⁷ Tribun Jabar. 2018. "Satgas Citarum Kembali Pergoki Pabrik Buang Limbah ke Sungai" . diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3980293/satgas-citarum-kembali-pergoki-pabrik-buang-limbah-ke-sungai> diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 10.20 WIB

Kepatuhan (*compliance*) merupakan salah satu pendekatan dalam kajian Implementasi kebijakan. Lebih lanjut dijelaskan menurut Weaver bahwa *compliance* merupakan: “*target group behave in ways that are consistent with the objectives of the policy*”⁸. Artinya, kelompok sasaran kebijakan berperilaku dalam koridor yang konsisten dengan sasaran kebijakan. Pemantauan dan sanksi yang diberikan *stakeholder* menunjukkan gejala bahwa mereka tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 sehingga berpotensi untuk menghambat implementasi undang-undang tersebut. Sebuah kebijakan pemerintah terdapat enam sumber yang mempengaruhi tingkat kepatuhan yaitu : insentif dan sanksi (*incentives and sanctions*), pemantauan (*monitoring*), sumber daya (*resources*), masalah otonomi (*autonomy problems*), masalah informasi (*information problems*), dan perilaku dan nilai (*attitudes and beliefs*).

Sistem sanitasi selalu terkait dengan masalah limbah dan saluran air kotor. Sebagai kota dengan segudang predikat, praktis Cimahi menyangga berbagai keberagaman aktivitas manusia sebagai penghasil limbah. Mulai dari limbah rumah tangga (mandi, mencuci atau memasak, perkantoran, sekolah, universitas, hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, sampai dengan industri skala kecil dan besar). Namun kenyataannya pembuangan limbah domestik, seperti limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama di Cimahi, sebagian

⁸ Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam Michael Hill dan Peter Hupe. 1986. *Implementing Public Policy*. London: Sage Publication. Hal. 62

besar saluran limbah cair tersebut masih dialirkan pada pusat IPAL yang ada di Kota Cimahi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan sebuah aktivitas penelitian ilmiah untuk mendapatkan gambaran mengenai alasan perilaku tidak patuh yang ditampilkan oleh *stakeholder* dikawasan Cibaligo Kota Cimahi terhadap peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian ilmiah yang mengangkat judul: **Analisis Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Studi Kasus : Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut masih rendah, dilihat dari segi pemantauan dan sanksi yang diberikan tentunya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini, ternyata akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan tujuan untuk melihat bagaimana pratek penerapan PP No 82 Tahun 2001, yang akan ditinjau dari aspek kepatuhan dari stakeholder dari pemerintah dan pelaku usaha.

Pertanyaan penelitian yang akan di angkat dalam kajian ini adalah:

- *Bagaimana tingkat Kepatuhan Stakeholder dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi ?*
- *Bagaimana pengaruh stakeholder dalam implementasi Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 Dikawasan Industri Cibaligo Kota Cimahi?*

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kepatuhan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
2. Mendeskripsikan pengaruh implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi dan data bagi dinas lingkungan hidup Kota Cimahi mengenai kepatuhan pengawasan agar lebih baik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaraan air.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi pengelolaan air limbah industri yang harus memiliki baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 melihat dari perspektif tingkat kepatuhan *stakeholder*, dan juga akan menguraikan apa saja penyebab ketidakpatuhan tersebut. Untuk itu, sistematika penulis dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Profil Penelitian, Bab V Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran.